

PERSPEKTIF BUDAYA POLRI MENYONGSONG MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

(oleh Mayjen. Pol. Drs. Bibit S. Rianto, MM)

PENGANTAR

Dalam rangka Rakernis Pendidikan dan menjawab arahan pertama Kapolri Jenderal Pol. Drs. Rusdihardjo, untuk membangun budaya Polri yang lebih baik dalam 3 (tiga) bulan mendatang. Dalam hal ini akan saya kemukakan sedikit bahasan tentang Budaya, Budaya Polri saat ini, Budaya Polri yang diharapkan dan bagaimana membangun Budaya Polri yang sesuai dengan kehendak masyarakat.

BUDAYA

Budaya (culture) sebagaimana diuraikan oleh Charles Hampden Turner: Budaya yang sering digunakan oleh ilmuwan sosial adalah untuk menggambarkan keseluruhan pedoman hidup, pedoman bertindak, merasakan dan berfikir, yang dipelajari oleh kelompok-kelompok masyarakat dari pada didapatkan secara biologis.¹

Keseluruhan tadi terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan berbagai macam kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota dari suatu masyarakat. Prof. Dr. C. A. Van Peursen². Dewasa ini budaya diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang-orang, berlainan dengan hewan-hewan, maka manusia tidak hidup begitu saja ditengah-tengah alam, melainkan selalu mengubah alam itu; ... kini budaya dipandang sebagai sesuatu yang lebih dinamis bukan sesuatu yang statis; ... budaya termasuk tradisi, yang manusia dapat menerimanya, menolaknya atau mengubahnya, itulah sebabnya maka budaya merupakan cerita perubahan-perubahan, riwayat manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola budaya yang sudah ada.

Dari uraian diatas kita dapat menarik beberapa hal sebagai unsur-unsur yang terkait dalam pengertian budaya yaitu: (1) merupakan pedoman hidup, bertindak, merasa dan berfikir, (2) dapat dipelajari, (3) wujud berupa pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, kemampuan dan kebiasaan, (4) manusia berbeda dengan hewan, (5) tidak statis dalam arti dapat dirubah, diterima dan ditolak.

¹ Turner, Hampden Charles, *Corporate Culture How to Generate Organization Strangth and Lasting Commercial Advantage*, Kent, Piatkus, 1994, P. 11

² Peursen Van C. A., Prof. Dr. *Strategi Kebudayaan*, diterjemahkan oleh Hartoko, Dich, Jakarta, Kamisius, 1998, P. 10 dan 11.

BUDAYA POLRI SAAT INI

Polri baik sebagai suatu kelompok maupun individu terikat dalam suatu budaya yang dapat berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Bagaimana kondisi budaya Polri saat ini, marilah kita lihat buku Reformasi Polri.³

Dijelaskan budaya organisasi sebagai berikut :

a. Budaya organisasi di lingkungan Polri adalah kebiasaan-kebiasaan yang sedemikian rupa telah melekat pada tubuh Polri dan berlaku dari waktu ke waktu hampir secara ajeg, meskipun kadarnya berfluktuasi sekedarnya tergantung pada watak dan karakter pimpinan puncak Polri, bentuk dan sifat organisasi serta perkembangan lingkungan di luar organisasi Polri.

b. Kata “budaya” seharusnya berkonotasi positif yaitu berisikan kebiasaan-kebiasaan yang ditandai oleh hal-hal etis, estetis dan logis/masuk akal (sesuai dengan common sense), namun secara sosiologis pengertian tersebut telah pula berkembang menjadi disamping positif, terdapat juga hal-hal yang bersifat negatif.

c. Dalam rangka reformasi yaitu sebagai gerakan moral untuk

mengubah atau menghilangkan hal-hal negatif, menjadi perlu untuk mengidentifikasi terlebih dahulu hal-hal yang bersifat negatif tersebut yang berlaku di lingkungan organisasi Polri. Selanjutnya diupayakan untuk mencari penyebabnya, dianalisis dan dicarikan solusi/penanggulangannya.

d. Berikut ini akan diuraikan beberapa indikator budaya organisasi yang bersifat negatif yang harus dihilangkan dari tubuh Polri :

1) Gaya militeristis.

a. Sebagai aparaturnegara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, maka gaya militeristis justru akan sangat merugikan profesionalisme Polri, seperti menunggu perintah atasan, bergerak dalam ikatan regu, dan lain-lain.

b. Sikap militer yang “kaku” dan “patah-patah”, bahkan sering kali terkesan kasar dan keras menjauhkan Polri dari masyarakat yang dilayaninya, terlebih-lebih apabila sikap itu terwujud menjadi tindakan-tindakan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang memerlukan pelayanan Polri.

c. Sikap militer tidak semuanya tidak cocok untuk Polri seperti disiplin, sikap korek, kerapihan, kecermatan, dan lain-lain, masih perlu dipertahankan melalui melalui pola pelatihan yang

³ Rianto S. Bibit, Drs. M.M., *Reformasi Polri suatu pemikiran ke arah kemandirian dalam rangka menegakkan supremasi hukum*, Jakarta 1999, P.33.

garan disiplin maupun pelanggaran pidana.

- Menciptakan tradisi Polri yang baru dalam kehidupan kesatuan maupun kehidupan pribadi anggota Polri.
- Penyebarluasan dan penghayatan Kode Etik Kepolisian dan pengamalannya dalam kehidupan kesatuan dan pribadi anggota Polri.

Upaya-upaya tersebut diatas, merupakan upaya merubah budaya negatif Polri yang banyak dirasakan oleh anggota Polri dan masyarakat, yang harus dilakukan oleh segenap anggota pada segenap jajaran Polri dan masyarakat, yang harus dilakukan oleh segenap anggota pada segenap jajaran Polri. Perlu dicatat bahwa Polri tidak hidup ditempat yang kosong, tetapi Polri hidup ditengah-tengah masyarakat, bangsa. Dengan sendirinya budaya negatif Polri tidak terbentuk hanya oleh anggota Polri saja, tetapi merupakan suatu hasil interaksi antara anggota Polri dengan anggota masyarakat. Oleh karenanya dalam merubah-rubah budaya ini, Polri tidak bisa bekerja sendirian, oleh karena itu perlu dilakukan upaya bersama oleh segenap komponen bangsa. Untuk dapat melaksanakan upaya tersebut harus dilakukan berdasarkan kebijaksanaan pembangunan sosial budaya. Prof. Dr.

Jujun S. Suriasumantri menjelaskan ada 2 (dua) kebijaksanaan utama yaitu: (1) kebijaksanaan dasar yang merupakan unsur pemersatu (the common denominator) dari segenap sektor kebudayaan, dan (2) pokok-pokok kebijaksanaan masing-masing sektor budaya yang satu sama lainnya terkait oleh unsur pemersatu tersebut.⁴ Kebijaksanaan ini diarahkan pada (1) pembentukan nilai yang mengacu kepada warisan budaya Indonesia yang luhur, kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembentukan sikap yang tercermin dalam perbuatan, (2) pengembangan kelembagaan sosial yang berpijak pada nilai-nilai budaya yang luhur, asas berbangsa dan bernegara serta penerapan konsep-konsep modern, tidak saja mengangkat struktur tetapi juga proses, prosedur dan nilai sikap tindak yang membudaya dan yang mengikat kelompoknya, (3) pengembangan kondisi obyektif yang mendorong perkembangan nilai-nilai yang ingin ditumbuhkan tersebut baik pada manusia perorangan maupun perangkat sosial, (4) penyediaan prasarana dan sarana sosial yang mendukung terwujudnya ketiga tujuan tersebut

Keseluruhan sasaran ini didekati dengan pendekatan yang bersifat mendidik, pengembangan paradigma dan partisipasi masyarakat secara demokrasi, sehingga pendekatan ini dinamakan pendekatan edukatif - paradigmatik - partisipatif pendidikan merupakan sarana formal dalam membantu manusia Indonesia yang

⁴ Suriasumantri S. Jujun, Prof. Dr, dkk, *Masalah Sosial Budaya Tahun 2000, sebuah bunga rampai*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1987, P. 58, 59.

bersifat utuh, yakni bertaqwa, cerdas, terampil, berbudi luhur dan berkepribadian Indonesia. Pendidikan juga sebagai pusat pengembangan kebudayaan, dimana pendidikan secara sadar harus mengandung nilai-nilai baru yang selanjutnya dikembangkan secara terarah dan sistematis, yang diintegrasikan kedalam kurikulum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar.

Pertanyaannya pendidikan kita (Polri) sudah sampai kesinikah? Anda sekalian yang berhak mencari jawabannya memang Polri merupakan salah satu sektor budaya bangsa namun pola pengembangan budaya nasional bisa saja diterapkan dalam pengembangan budaya Polri.

Polri yang merupakan National Police, yang memiliki darah kekuasaan seluruh Indonesia yang hampir seluas Eropa, memiliki lebih dari 300 suku bangsa, bahasa dan variasi agama serta kepercayaan, dalam pembangunan budaya Polri secara nasional akan menerima pengaruh dari kehidupan masyarakat yang majemuk tersebut.

Prof. Dr. Fuad Hassan, mengemukakan ada 2 (dua) pengaruh besar yaitu dari aspek kesejarahan dan

dari aspek perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan iptek telah memungkinkan terjadinya pertemuan-pertemuan antarbudaya (cultural encounters), sehingga hampir mustahil suatu lingkungan budaya dapat dipertahankan kebudayaannya dari pengaruh eksternal, sedangkan aspek kesejarahan dimaksudkan sebagai usaha presentasi pengejawantahan budayannya yang khas untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari bangsa itu.⁵

Disebutkan pula dari buku tersebut bahwa salah satu faktor penentu terbentuknya perubahan/pertahanan budaya adalah oleh perilaku **Trend Setters** (penentu kecenderungan). Hal ini disebabkan oleh adanya orientasi “keatas” dan orientasi “status”, yang menyumbang kecenderungan suatu lapisan masyarakat untuk memandang lapisan diatasnya sebagai percontohan selera dan gaya kehidupan. Dengan demikian, maka figur seorang Kepala Polisi menentukan budaya organisasi yang dipimpinnya. Trend yang berkembang saat ini pada dasarnya tidak hanya berupa upaya terpenuhinya kebutuhan dasar saja tetapi upaya memenuhi selera dan gaya trend setters tersebut, untuk dapat memanjat tangga sosial selekasnya melalui pengejawantahan selera dan gaya tersebut.

Budaya-budaya negatif yang dimiliki Polri saat ini nampaknya tidak terlepas dari penampilan selera dan gaya sang pemimpin, oleh karenanya peran Komandan/pendidik/pelatih

⁵ Hassan Fuad, Prof. Dr. *Renungan Budaya*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, P.31 dan 32.

⁶ Ayatrohadi, *Kepribadian Budaya Bangsa (local genius)*, Bandung, Pustaka Jaya, 1986, P.18, 19.

akan sangat menentukan pembentukan budaya polisi melalui lembaga-lembaga pendidikan.

Selanjutnya suatu budaya bisa bertahan terhadap pengaruh budaya lain, karena berakar pada identitas budaya (cultural identity atau local genius) yang kuat. Prof. Dr. Haryati Subadio menjelaskan bahwa local genius secara keseluruhan meliputi dan mungkin malahan dapat dianggap sama dengan apa yang terkenal dengan cultural identity, yang diartikan sebagai identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa, yang mengakibatkan, bahwa bangsa bersangkutan menjadi lebih mampu menyerap dan mengolah pengaruh kebudayaan yang mendatanginya dari luar wilayah sendiri, sesuai dengan watak dan kebutuhan pribadinya.⁶ Namun penghayatan identitas budaya yang berlebihan dapat memicu timbulnya konflik, seperti yang sedang berlangsung saat ini di dunia dan Indonesia. Dikalangan TNI-Polri dikenal sebagai P'spri de corps yang sempit.

Masalahnya sekarang dari mana kita mulai, membangun budaya Polri yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Pertanyaan lanjut, masyarakat yang mana ?

Namun yang pasti harus segera digarap adalah :

(1) Penataan **nilai-nilai** yang mendasari pelaksanaan tugas Polri, secara mendasar harus dapat diinternalisasi oleh segenap anggota dan diwujudkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari.

(2) Pelembagaan nilai-nilai kedalam pedoman Kode Etik dan aturan-aturan pelaksanaan tugas (mulai perundang-undangan sampai kepada buku-buku petunjuk); dan mudah dipahami dan dilaksanakan anggota.

(3) Proses manajemen yang handal baik pada aspek perencanaan, pembinaan, operasional dan pengawasan mulai dari tingkat Mabes Polri sampai kepada lini terdepan (Polsek/Pspol).

(4) Keteladanan dari trend setters (penentu kecenderungan) untuk hidup secara bersih, jujur, berani dan konsisten.

(5) Reward and punishment yang konsisten terhadap setiap aktifitas anggota.

Demikian pokok-pokok pikiran tentang Perspektif Budaya Polri menyongsong masa depan yang lebih baik.